

BAB V

PEMBAHASAN

A. Bentuk Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Menerapkan Moderasi Beragama Di SMPN Satu Atap Bujur Barat Pamekasan

Kebijakan kepala sekolah dalam menerapkan moderasi beragama di sekolah SMPN Satu Atap Bujur barat Pamekasan diantaranya yaitu wajib bersikap saling menghormati dan menghargai, wajib bersikap adil terhadap setiap warga sekolah, wajib ikut serta setiap kegiatan keagamaan sekolah, wajib menjunjung tinggi persatuan bangsa, dan wajib menjaga keharmonisan warga sekolah. Kepala sekolah memiliki hak dan kewajiban atas segala kebijakan yang dibuat guna untuk memajukan sekolah yang dipimpin. Oleh sebab itu, sehubungan kondisi siswa yang sebelumnya sering terdapat laporan berkenaan dengan sikap deskriminasi satu sama lain antara siswa yang beragama Islam dengan siswa yang non Muslim, maka kepala sekolah dengan cepat bertindak untuk menghilangkan sikap tersebut dengan cara membuat suatu kebijakan berkenaan dengan bersikap moderat.

Sebagai peminan sekolah, kepala sekolah dalam menentukan dan membuat suatu kebijakan setidaknya memahami terlebih dahulu segala kebutuhan yang dapat melangsungkan proses belajar mengajar tetap efektif dan efisien. Tugas kepala sekolah tidak hanya sebagai guru yang mendapatkan tugas tambahan memimpin lembaga, melainkan juga sebagai supervisi dan administrator yang mesti menjadi panutan bagi bawahannya. Oleh sebab itu,

sebelum melakukan dan menciptakan kebijakan, tugas kepala sekolah pertama kali ialah menentukan tujuan dengan memperhatikan:

- a. Individu yakni setiap perorangan seluruh sumber daya manusia di sekolah baik yang berhubungan dengan kebutuhan, bakat, minat, serta hubungan setiap kinerja.
- b. Sekolah yakni lingkungan sekolah yang mesti diperhatikan suasana iklim, budaya dan tradisi untuk memberikan keseimbangan.
- c. Alur kerja yakni jalannya suatu sistem yang telah ditentukan mulai dari target, tata cara, materi, pelaksanaan dan lain sebagainya.
- d. Sistem politik kerja yakni memperhatikan segala yang berkaitan dengan kebijakan mulai dari administrasi, anggaran, penghargaan, dan lain sebagainya.¹

Menjadi kepala sekolah hendaknya mampu menjadi pemimpin yang dapat membawa lembaga dan sumber daya lembaga bergerak dan mencapai tujuan yang telah diinginkan dan ditetapkan secara bersama. Selain itu, juga hendaknya dapat menerawang segala perubahan yang dimungkinkan dapat terjadi dimasa depan sehingga dapat mempersiapkan segala sesuatu yang dapat menjadikan lembaga tetap berdiri kokoh walaupun menghadapi era globalisasi. Kemudian tak hanya itu, kepala sekolah memiliki tanggung jawab yang besar atas segala keberhasilan pengaturan dan tata kelola sekolah. Kepala sekolah merupakan pimpinan yang memiliki keahlian seni memimpin dengan baik guna mempengaruhi setiap bawahannya untuk maju bersama. Kepala

¹ Muhammad Afdal dan Sulvahrul Amin, Implementasi Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru di SMA Negeri 4 Kabupaten Bantaeng, 117.

sekolah yang dikatakan sukses dan berprestasi dalam memimpin ketika mampu mewujudkan segala harapan para bawahannya akan tercapainya tujuan yang telah disepakati bersama. Sehingga bawahan kepala sekolah dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan puas, efektif, dan efisien.

Keberlangsungan organisasi sekolah secara pelaksanaannya tergantung dari cara memimpin kepala sekolah. Mulai dari pengelolaan, pembinaan, bahkan administrasi hendaknya berada dalam pantauan kepala sekolah yang baik. Sehingga kepala sekolah hendaknya memiliki beberapa kemampuan yang dapat memberikan ilmu dan pengalaman kepada bawahannya. Seperti kepala sekolah hendaknya memiliki kemampuan administrator yang baik guna untuk membuat rencana, mengorganisasikan, memberikan arahan kepada setiap bawahannya, mengkoordinasikan, dan mengawasi seluruh kegiatan pendidikan yang ada di sekolah mulai dari pembelajaran hingga kegiatan seluruh staf dan karyawan.²

Kondisi sebelum adanya kebijakan dari kepala sekolah, sikap toleransi dalam diri siswa sangat minim sekali. Jika ada siswa yang beragama non Muslim, sering kali diolok-olok atau diejek oleh siswa yang beragama Islam bahkan ketika di lingkungan sekolah ataupun ketika pulang sekolah siswa yang minoritas sering kali disudutkan bahkan sering kali dibuli oleh teman-temannya. Hingga akhirnya, kepala sekolah memiliki kehendak untuk membuat suatu kebijakan berkenaan dengan bagaimana siswa memiliki sikap moderat. Moderasi beragama itu sendiri sangat dibutuhkan oleh jiwa-jiwa

² Muhammad Afdal dan Sulvahrul Amin, Implementasi Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru di SMA Negeri 4 Kabupaten Bantaeng, 116.

pemuda penerus bangsa, mengingat bahwa Indonesia itu sendiri merupakan suatu negara kesatuan yang terdiri dari berbagai macam budaya dan agama yang mana tercantum dalam sila ke-tiga yakni persatuan Indonesia.

Begitu pentingnya moderasi beragama bagi generasi bangsa, akhirnya Kementerian Agama di Indonesia menyerukan moderasi beragama melalui proses pendidikan di seluruh lembaga pendidikan Islam. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Peraturan Menteri Agama (PMA) Pengarusutamaan moderasi beragama serta menggerakkan pimpinan Ditjen Pendidikan Islam. Selain itu, juga diterbitkan buku-buku tentang moderasi beragama khusus untuk peserta didik dengan alasan memberikan penguatan berkenaan dengan pentingnya moderasi beragama yang juga mulai diviralkan di media sosial. Dengan demikian, kurikulum pendidikan juga menyamakan dengan yang diinginkan oleh Kementerian Agama sebagaimana hasil penelitian Siswanto, Yunus, maupun Ekawati yang menyatakan bahwa pemerintah memprogramkan kurikulum pendidikan hendaknya memuat tentang moderasi.³

Temuan penelitian pada fokus pertama ini yang berkaitan dengan bentuk kebijakan kepala sekolah dalam menerapkan moderasi beragama di SMPN Satu Atap Bujur Barat Pamekasan ialah berbentuk beberapa peraturan atau tata tertib sekolah. Sehingga tata tertib tersebut wajib hukumnya dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Jika terdapat yang melanggar atau tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka yang melanggar itu akan

³ Dina Mardiana dan Mochammad Taufiqi Rachman, Aktualisasi Moderasi Keberagamaan Di Lembaga Pendidikan Berciri Islam: (Studi Pada Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Malang Jawa Timur Indonesia), 26.

mendapatkan peringatan dan teguran langsung dari kepala sekolah. Kemudian didalam tata tertib tersebut terdiri dari beberapa kewajiabn yang menjadi kebijakan kepala sekolah juga. Hanya saja secara umum, bentuk utama kebijakan kepala sekolah dalam menerapkan moderasi beragama berbentuk tata tertib sekolah atau peraturan sekolah yang didalamnya terdiri dari beberapa bagian sebagaimana berikut:

1. Wajib Bersikap Saling Menghormati Dan Menghargai

Bersikap saling menghormati dan menghargai yang diterapkan di SMPN Satu Atap Bujur Barat Pamekasan tersebut merupakan sikap yang wajib diterapkan bagi seluruh warga sekolah dalam hidup di lingkungan sekolah yang terdapat siswa non Muslimnya. Meskipun di sekolah tersebut siswa non Muslim hanya menjadi minoritas, akan tetapi kepala sekolah meberikan kebijakan tersebut guna menangkis kata deskriminasi yang sering terjadi di sekolah tersebut. Latar belakang warga sekolah yang banyak berasal dari desa yang identik dengan sifat fanatisme terhadap perbedaan agama, menjadi salah satu alasan kepala sekolah mewajibkan untuk bersikap saling menghargai dan menghormati antar sesama.

Saling menghargai dan menghormati diterapkan dalam segala kegiatan apapun baik selama masih didalam lingkungan sekolah ataupun ketika diluar sekolah. Sehubungan dengan siswa non Muslim yang jumlahnya hanya sedikit, maka seluruh warga sekolah yang Muslim wajib menghargai keyakinan yang dianut siswa non Muslim dengan cara tidak menggoyahkan atau bahkan mengejek apa yang diyakininya. Kemudian

berkenaan dengan cara berpakaian ataupun hal yang berkaitan dengan siswa non Muslim yang mana itu dianggap berbeda dengan yang lain, warga sekolah Muslim wajib menghormatinya dengan cara menerima dan membiasakan diri dengan perbedaan tersebut. Semisal yang lain memakai kerudung, sedangkan yang non Muslim tidak memakai kerudung.

Jadi, didalam lingkungan sekolah antara yang Islam dan non Muslim bersikap biasa saja walaupun dari segi penampilan, cara beribadah atau bahkan lainnya itu berbeda dengan yang biasanya yakni mayoritas Islam. Jika terdapat ada yang ditemukan bersikap risih bahkan mengejek, maka kepala sekolah menganjurkan untuk segera melapor agar langsung diberi peringatan dan teguran agar tidak diulangi kembali.

Kemudian menurut Tarmizi Tohor menyatakan bahwa sikap moderasi beragama bukan lantas menjadikan diri sendiri meninggalkan agama, atau menjadi lemah terhadap agama yang dianutnya, atau bahkan menjadi lebih terbuka dan bebas akan agama lain, melainkan menjadikan diri sendiri bersikap menengah dan biasa saja terhadap segala perbedaan yang ada baik berkaitan dengan agama, kultur, dan lainnya. Perbedaan tersebut merupakan warisan nenek moyang yang mesti dihargai dan dihormati sebagai warisan budaya di Indonesia yang memang dari dahulu terkenal dan khas dengan keberagamannya. Menjadikan antara agama dengan budaya menjadi sejalan sebagaimana mestinya tanpa harus menyikapi secara anarki setiap perbedaan.⁴

⁴ Samsul AR, Peran Guru Agama Dalam Menanamkan Moderasi Beragama, 40-41.

2. Wajib Bersikap Adil Terhadap Setiap Warga Sekolah

Kewajiban untuk bersikap adil terhadap warga sekolah baik yang Islam maupun yang non Muslim menjadi kebijakan kepala sekolah juga yang harus diterapkan oleh warga sekolah. Adil yang dimaksud dalam kebijakan tersebut seperti halnya tidak membeda-bedakan ketika kegiatan belajar mengajar atau kegiatan yang lainnya. Misalnya, dikarenakan siswa non Muslim, maka ketika mata pelajaran pendidikan agama Islam tidak boleh ikut serta didalam kelas, atau bahkan disuruh untuk keluar kelas. Hal itu tidak diperbolehkan di sekolah tersebut karena bersikap adil dalam artian lembaga tersebut bagaimana memberikan sikap dan perhatian yang sama bagi seluruh warga sekolah tanpa membedakan satu sama lainnya.

Ketika siswa non Muslim tetap berbaur dalam kegiatan apapun yang ada di sekolah tersebut tanpa harus dibedakan lantaran beda agama, maka sikap adil itu telah diberlakukan, karena adil merupakan sikap seimbang tanpa berat sebelah terlebih-lebih condong sebelah. Prakteknya, ketika mata pelajaran agama Islam, siswa non Muslim disarankan untuk tetap didalam kelas baik mau mendengarkan ataupun tidak. Hal itu dikarenakan untuk menghindari ketersinggungan ketika harus disuruh keluar kelas. Meskipun dianjurkan untuk tetap didalam kelas, guru agama tidak memaksa siswa tersebut untuk paham atau bahkan mengikuti apa yang diajarkan oleh guru agama. Siswa tersebut tetap diberi kebebasan yang terpenting tetap didalam kelas dan tidak mengganggu teman-

temannya yang lain. Hal itu dilakukan guna untuk membangun sikap keakraban antara guru dan siswa non Muslim atau siswa dengan siswa agar berbaur satu sama lain.

Hashim Kamali mengutarakan pendapatnya berkenaan dengan moderasi bahwa tidak dapat terpisahkan dari kata kuncinya yakni keseimbangan dan keadilan. Oleh sebab itu, moderasi dalam bentuk sikapnya bukan berarti menerima dan mempercayai apa yang diyakini oleh ajaran yang lain melainkan bagaimana saling menghormati perbedaan ajaran lain tersebut. Pelaksanaan moderasi membutuhkan keseimbangan dan keadilan agar terlaksana dengan efektif untuk menghindari sikap ekstrem pada salah satu pandangan. Maka dari itu, ekstrem dalam kata moderasi hendaknya sangat dijauhkan guna untuk menciptakan moderasi. Jika kata ekstrem tersebut masih berada dalam lingkup kehidupan sosial, maka yang ada sikap intoleran akan terus mengikuti jejak kehidupan terlbih-lebih jika disulut api politik.⁵

3. Wajib Ikut Serta Setiap Kegiatan Keagamaan Sekolah

Sehubungan sekolah SMPN Satu Atap Bujur Barat Pamekasan merupakan sekolah yang mayoritas Islam, maka kegiatan keagamaan sekolah banyak yang diadakan dalam rangka memperingati keagamaan Islam. Hal tersebut bukan tanpa alasan, tetapi dalam Islam dianjurkan bersikap toleransi bukan berarti mengikuti segala ajaran bahkan mengikuti dalam perayaannya. Hanya saja, ketika terdapat peringatan hari agama non

⁵ Edy Sutrisno, Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan, 328.

Islam, sekolah tersebut cukup menghargai dan menghormati melalui beberapa ucapan dan tindakan lainnya tanpa ikut merayakan pula. Oleh sebab itu, yang menjadi kewajiban untuk ikut serta dalam kegiatan keagamaan di sekolah tersebut ialah bagi siswa non Muslim. Siswa tersebut diberikan kewajiban untuk ikut serta ketika terdapat perayaan hari besar keagamaan seperti Maulid Nabi Muhammad saw., dan lainnya.

Kegiatan keagamaan yang wajib diikuti oleh siswa non Muslim tersebut bukan tanpa alasan. Melainkan dengan tujuan bahwa siswa non Muslim mampu bersikap toleransi kepada agama Islam sehingga menjadikan contoh yang baik bagi para warga sekolah yang mayoritas Islam untuk juga menjunjung tinggi sikap toleransi. Dengan kebiasaan tersebut, lama kemudian akan menjadi karakter bagi seluruh warga sekolah dalam bertoleransi hidup berdampingan dengan segala perbedaan. Hingga pada saat ini, ketika terdapat kegiatan keagamaan apapun, siswa non Muslim diwajibkan untuk ikut serta sebaliknya juga ketika hari-hari besar agama yang dianut siswa non Muslim, warga sekolah yang Islam juga menghargai dan menghormati melalui ucapan dan lain sebagainya.

Sikap moderasi merupakan sikap yang disunnahkan dalam Islam karena dianggap sebagai rahmat bagi manusia untuk bersikap menghargai dan menghormati setiap perbedaan. Selain itu, sikap moderasi dalam Islam mencerminkan sikap yang tidak mudah menyalahkan, menghakimi, atau mengkafirkan pandangan orang lain yang berbeda dengan agama Islam. Hal itu dikarenakan dalam Islam, sikap moderasi lebih bagaimana

manusia memiliki sikap yang mengutamakan rasa persaudaraan yang tinggi dengan didasari pada rasa kemanusiaan bukan hanya pada rasa kebangsaan ataupun rasa keimanan.⁶

4. Wajib Menjunjung Tinggi Persatuan Bangsa

Sikap bermoderasi agama memang ditumbuhkan melalui kebiasaan kegiatan atau melalui cekokan pemahaman dan pengertian kepada warga sekolah. Meskipun kebijakan moderasi beragama dilakukan guna untuk meminimalisir kata deskriminasi didalam sekolah tersebut, kebijakan yang dibuat juga guna untuk mendukung cita-cita bangsa untuk tetap bersatu hingga waktu yang tak ditentukan. Sebagai bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman baik etnis, budaya, bahkan agama, hingga pada sila yang dijadikan pijakan bangsa Inonesia terdapat sila yang berkaitan dengan persatuan yaitu sila ke-tiga yang berisi persatuan Indonesia. Keanekaragaman yang ada disatukan dalam satu kesatuan bangsa yakni negara Indonesia. Jadi, dalam bentuk agama apapun, selagi itu sah dalam peraturan di Indonesia, maka agama tersebut akan mendapatkan posisi yang layak dalam bangsa ini.

Sehingga sekolah SMPN Satu Atap Bujur Barat mewajibkan seluruh warga sekolah agar tertanam sikap persatuan bangsa tanpa memandang rendah yang berbeda kasta, budaya, etnis, dan agama. Semuanya berbaaur dalam satu tujuan yakni untuk mencapai pendidikan yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Penanaman kewajiban

⁶ Agus Akhmadi, Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation In Indonesia's Diversity, 54.

tersebut melalui kebiasaan sikap cara berteman. Jadi, yang dianjurkan bukan hanya berbaur dengan yang beda agama saja, melainkan dengan yang beda secara tempat, jenis kelamin dan lainnya dianjurkan selalu oleh para guru bahkan kepala sekolah agar hidup bersatu.

Dalam akidah Islam, sikap moderasi ini dikenalkan oleh salah satu aliran Islam yaitu aliran asy'ariyah yang mana bersikap menengahi terhadap aliran muktazilah yang identik dan kental dengan pola pikir rasionalnya dengan aliran salafiah dan hanabilah yang identik dengan pola pikir yang tekstual. Keduanya sama-sama ekstrem dalam menyikapi dan mempertahankan pendapatnya. Aliran muktazilah begitu ekstrem menganggap bahwa akal berada pada posisi diatas dari segala-galanya dengan cara mengambil suatu kesimpulan melalui beberapa premis yang sifatnya logistik. Sedangkan aliran salafiah dan hanabilah menganggap bahwa teks merupakan segala-galanya dalam mengatasi suatu persoalan hingga mengabaikan hal yang masuk akal. Sehingga sikap kedua aliran ini dianggap sebagai sikap yang jauh dari cerminan Islam bahwa Islam merupakan agama yang seimbang. Oleh sebab itu, aliran asy'ariyah berada ditengah-tengah antara kedua aliran tersebut bahwa akal dan teks sama-sama dibutuhkan dalam suatu persoalan.⁷

5. Wajib Menjaga Keharmonisan Warga Sekolah

Ketika berbagai sikap saling menghargai, menghormati, adil dan lainnya diterapkan dengan baik dan benar, maka suasana rukun dan

⁷ Edy Sutrisno, Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan, 331.

harmonis dalam lingkungan sekolah akan tercipta dengan sendirinya. Hal itu juga wajib dijaga oleh warga sekolah karena mengingat ketika terdapat kerusuhan hanya lantaran perbedaan itu sangat tidak baik bahkan menjadi contoh yang buruk bagi sekolah lainnya atau akan mencoretkan nama baik sekolah. Oleh sebab itu, warga sekolah wajib menjaga keharmonisan warga sekolah baik berkaitan dengan sikap ataupun dengan ucapan. Jadi, setiap siswa tidak boleh ada yang bertengkar atau bermusuhan lantaran suatu perbedaan atau karena yang lainnya.

Penerapannya, seluruh guru dan para pegawai sekolah memberikan contoh yang baik kepada siswa dalam menjaga kerukunan antar warga sekolah. Hal ini hampir sama dengan yang diterapkan di sekolah mana saja bahwa tidak boleh ada permusuhan yang dilakukan oleh warga sekolah baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah guna menjaga nama baik sekolah. Keharmonisan yang patut dijaga tersebut berbentuk kerukunan antar sesama. Jadi, antara satu sama lain tidak boleh saling menyinggung yang menyebabkan nantinya terdapat rasa sakit hati akibat perbuatan atau ucapan. Dalam konsep moderasi agama itu sendiri, keharmonisan dan kerukunan antar sesama sangat dijunjung tinggi karena kunci moderasi beragama berada dalam sikap penjagaan serta pemeliharaan pada kerukunan dan keharmonisan dalam hidup yang saling berdampingan.

Didalam Islam, dakwah Islamiyah berarti *amar ma'ruf dan nahi munkar* yakni menyerukan kebaikan dan melarang kemungkaran. Untuk

melakukan dakwah di jalan Allah, hendaknya memperhatikan kondisi masyarakat sebagai sasaran dakwah baik dalam segi budaya, kebiasaan, tradisi dan lainnya agar apa yang didakwakan tersampaikan dengan tepat dan cepat. Pendakwah tidak bisa bersikap egois bahwa yang paling benar adalah menurut dirinya melainkan disesuaikan dengan kondisi masyarakat sebagai bentuk sikap moderasi beragama dalam dakwah Islam.⁸

B. Strategi Kepala Sekolah Dalam Mewujudkan Kebijakan Moderasi Beragama Di SMPN Satu Atap Bujur Barat Pamekasan

Bentuk-bentuk kebijakan yang berkenaan dengan moderasi beragama yang telah disebutkan sebelumnya membutuhkan beberapa strategi dalam penerapannya guna apa yang dicita-citakan tercapai secara maksimal. Strategi yang dibuat oleh kepala sekolah yang kemudian disepakati oleh seluruh bawahannya tidak serta merta diambil tanpa adanya pertimbangan yang kuat. Mulai dari mempertimbangkan kemungkinan terlaksananya hingga terjadinya hal yang tidak diinginkan. Di lembaga SMPN Satu Atap Bujur Barat Pamekasan, kepala sekolah beserta bawahannya memutuskan beberapa strategi yang sah dijadikan sebagai cara dalam menerapkan beberapa kebijakan kepala sekolah yang dibuat berkenaan dengan moderasi beragama.

Menurut Suwitri, kebijakan ialah beberapa tindakan yang dirangkai menjadi satu kesatuan yang diusulkan baik oleh individu ataupun kelompok dalam lingkungan tertentu dengan cara juga menampilkan beberapa kesempatan yang dapat diperoleh dari usulan tersebut dan juga hambatan yang

⁸ Edy Sutrisno, Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan, 340.

dimungkinkan terjadi dalam mencapai suatu tujuan. Pada prakteknya, terdapat dua langkah dalam melaksanakan kebijakan yakni menerapkan kebijakan secara langsung dan menerapkan kebijakan melalui kebijakan turunan yang datangnya dari publik. Kebijakan yang terdapat di sekolah dibuat oleh seseorang yang memiliki hak dan tanggung jawab dalam membuat kebijakan yaitu kepala sekolah ataupun dewan sekolah yang memang secara tetap diberi tugas dan tanggung jawab dalam membuat suatu kebijakan untuk mencapai tujuan sekolah.⁹

Model kebijakan kepala sekolah merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah berdasar pada estimasi guna menjadikan pendidikan lebih maju melalui beberapa pertimbangan mengenai tujuan, strategi, dan kebutuhan lingkungan sekitar. Adapun beberapa model kebijakan kepala sekolah ialah:

- a. Model deskriptif yakni model kebijakan dengan cara mendapatkan kebijakan melalui penelitian ilmiah baik secara murni ataupun terapan untuk mengetahui berbagai gejala yang terjadi di lingkungan masyarakat.
- b. Model normatif yakni model kebijakan dengan cara meningkatkan kapasitas kinerja secara optimal melalui suatu ide yang datang dari kepala sekolah yang kemudian diambil suatu keputusan secara bersama untuk menyelesaikan problema dalam kebijakan-kebijakan. Dengan model ini, kebijakan sekolah diambil dari pertimbangan yang sangat baik guna mengatasi masalah pendidikan yang dialami oleh masyarakat sekitar.

⁹ Zaenab Hanim dkk, Kebijakan Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Guru, 46.

- c. Model verbal yakni model kebijakan dengan cara menformulasikan kebijakan melalui bahasa sehari-hari. Kepala sekolah yang menggunakan model verbal akan menciptakan kebijakan berdasarkan pada bahasa dan gaya yang sudah biasa dipakai sehari-hari tanpa harus begitu formal.
- d. Model sebagai pengganti dan perspektif. Model sebagai pengganti yakni model kebijakan dengan cara mensimulasikan beberapa masalah yang substansi. Dalam model pengganti, masalah yang formal terjadi dianggap sebagai masalah yang sangat substansi. Sedangkan model sebagai perspektif yakni model kebijakan dengan cara membuat kebijakan secara ilmiah serta pengajuan norma, kaidah atau hukum yang dapat menyelesaikan masalah. Model sebagai perspektif biasanya disebut dengan model kebijakan yang menghasilkan analisis data. Oleh sebab itu, dalam suatu masalah hendaknya mampu diselesaikan melalui beberapa perspektif dan pengganti sehingga tidak menimbulkan masalah yang lebih besar.¹⁰

Temuan penelitian pada fokus kedua ini yang berkaitan dengan strategi kepala sekolah dalam mewujudkan kebijakan moderasi beragama di SMPN Satu Atap Bujur Barat Pamekasan terdiri dari beberapa strategi sesuai dengan apa yang dilaksanakan di sekolah tersebut. Strategi tersebut awalnya dibuat oleh kepala sekolah kemudian dibawa ke dalam rapat untuk disepakati secara bersama dengan para guru dan staff. Hal itu dilakukan oleh kepala sekolah karena yang akan melakukan segala kebijakan melalui beberapa strategi yang telah ditetapkan tersebut ialah seluruh warga sekolah baik kepala sekolah itu

¹⁰ Sania Putriana dkk, Kebijakan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5/1 (2021), (diakses pada tanggal 19 Februari 2022), 1278.

sendiri, guru, staf, dan para siswa. Adapun beberapa strategi yang dimaksud tersebut akan dirinci sebagai berikut:

1. Menggunakan Tata Tertib Sekolah

Strategi yang pertama digunakan oleh kepala sekolah ialah dengan menjadikan sikap moderasi beragama masuk dalam tata tertib sekolah yang mana hal tersebut menjadi kewajiban bagi setiap warga sekolah agar dipatuhi tidak dilanggar. Maksud kepala sekolah menggunakan strategi tata tertib tersebut dengan tujuan bahwa ketika menjadi suatu kewajiban dan terdapat sanksi ketika melanggar, maka dengan mudah hal yang menjadi wajib tersebut tertanam dalam warga sekolah. Tata tertib sekolah sifatnya wajib hukumnya dilaksanakan, jika tidak terlaksana, maka akan mendapatkan peringatan bahkan sanksi dari kepala sekolah. Dengan seperti itu, seluruh warga sekolah tidak bisa beralasan apapun untuk tidak melaksanakannya karena sudah menjadi kewajiban bersama.

Didalam tata tertib tersebut terdiri dari beberapa kewajiban yang berbentuk suatu kebijakan dari kepala sekolah. Sejauh ini, dengan menggunakan tata tertib sebagai strategi dalam penerapan moderasi beragama di sekolah tersebut berjalan dengan efektif dan efisien. Awalnya, memang masih banyak yang melanggar terutama para siswa, namun lambat laun karena sudah menjadi kewajiban setiap hari di sekolah tersebut, akhirnya yang melanggar semakin sedikit bahkan tidak ada. Hal itu dikarenakan yang melanggar tata tertib tersebut lebih banyak langsung ditangani oleh kepala sekolah itu sendiri.

Langkah-langkah dalam membuat kebijakan kepala sekolah terdapat tiga tahapan secara umum. Sehingga kepala sekolah memiliki tugas untuk membuat rencana, melakukan rencana, dan mengevaluasi rencana. Tiga tahapan yang mesti dilakukan kepala sekolah dalam membuat kebijakan tersebut antara lain:

- a. Formulasi kebijakan yakni tahap awal dalam membuat kebijakan melalui perumusan kebijakan terlebih dahulu.
- b. Implementasi kebijakan yakni tahap kedua setelah membuat perumusan, kepala sekolah menerapkannya untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan kebijakan merupakan beberapa rangkaian kegiatan yang telah diputuskan untuk memfasilitasi beberapa pernyataan kebijakan agar terealisasi dengan baik.
- c. Evaluasi kebijakan yakni tahap akhir untuk melihat dan mengetahui apakah yang telah diterapkan suatu kebijakan itu tercapai dengan baik atau masih terdapat beberapa kekurangan yang mesti dicarikan sebuah solusi.¹¹

Sedangkan menurut Yanto, dalam membuat suatu kebijakan secara umum terdapat beberapa langkah termasuk jika dilakukan oleh kepala sekolah dalam membuat kebijakan. Beberapa langkah tersebut antara lain:

- a. Perumusan masalah yakni dengan cara membuat beberapa rumusan yang dianggap sebagai masalah di suatu lembaga. Tahap ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa asumsi, media, pandangan, dan

¹¹ Sania Putriana dkk, Kebijakan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, 1279.

pendapat tentang sekolah sehingga jika ditemukan suatu yang berlainan kemudian dapat diusulkan kebijakan yang baru.

- b. Peramalan yakni tahap pemberian pengetahuan terhadap suatu kebijakan yang memiliki keterhubungan dengan beberapa masalah yang dimungkinkan dapat terjadi ketika kebijakan dilaksanakan. Dalam melakukan tahap peramalan, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan ialah proyeksi merupakan mendasarkan ramalan masa yang akan datang pada kejadian yang cenderung terjadi dimasa lalu dan masa sekarang yang juga cenderung terjadi dimasa depan; prediksi merupakan mendasarkan ramalan pada beberapa perkiraan terhadap asumsi teoritis asertif; dan estimasi merupakan mendasarkan ramalan pada penilaian seorang ahli mengenai kondisi masyarakat dimasa yang akan datang.
- c. Rekomendasi yakni tahap merekomendasikan ide kebijakan untuk mencapai tujuan melalui penyampaian prasyarat dan penerapannya.
- d. Pemantauan yakni tahap menyelidiki kebijakan yang dibutuhkan berkenaan dengan sebab akibat terjadinya kebijakan publik.
- e. Evaluasi yakni tahap akhir proses mengetahui kesesuaian dan ketidaksesuaian antara kebijakan yang diharapkan dengan hasil kebijakan yang telah dilaksanakan.¹²

¹² Sania Putriana dkk, Kebijakan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, 1277.

2. Menggunakan Kegiatan Keagamaan Sekolah

Kegiatan keagamaan sekolah menjadi strategi juga dalam menerapkan kebijakan moderasi beragama yang berasal dari kepala sekolah. Hal itu dipilih lantaran maksud kepala sekolah ingin sikap moderat yang ditanamkan di lingkungan sekolah diterapkan juga ketika berada di lingkungan sosial masyarakat ketika di luar lingkungan sekolah. Ketika terbiasa berbaur atau saling menghormati pada saat perayaan keagamaan yang di lingkungan sekolah, maka ketika di rumah atau lingkungan masyarakat juga akan terbiasa. Sehingga sifat fanatisme yang terjadi didalam masyarakat akan perbedaan agama juga akan hilang sedikit demi sedikit. Misalnya, ketika perayaan Isra'Mi'raj di sekolah, sehubungan ada kewajiban untuk ikut serta walaupun yang bukan beragama Islam, maka untuk siswa yang Islam ketika merayakan hari-hari besar di luar sekolah juga akan terbiasa jika ada yang bukan non Muslim menghormati perayaan tersebut. Begitupun sebaliknya, jika sedang ada perayaan hari besar agama lain, maka siswa non Muslim dengan senantiasa juga akan menghormati kegiatan tersebut di luar sekolah.

Maksud kewajiban tersebut bukan untuk memaksa antar satu sama lain untuk mengikuti keyakinannya juga. Melainkan hanya dengan maksud membiasakan bersikap toleransi ditengah-tengah kehidupan yang penuh dengan perbedaan. Jadi, didalamnya tidak ada unsur niatan ingin memaksa mengikuti antar satu sama lain. Strategi ini digunakan hanya untuk membiasakan siswa terbiasa dengan hidup berdampingan sosial agama

yang berbeda-beda. Meskipun siswa non Muslim diberi kewajiban untuk mengikuti kegiatan dalam rangka merayakan hari besar Islam, siswa tersebut tidak dituntut untuk paham atau bahkan juga merubah keyakinannya juga. Begitu sebaliknya, walaupun ketika hari besar agama lain selain Islam, yang beragama Muslim wajib menghormati dengan memberikan ucapan atau bentuk lainnya, bukan berarti menuntut siswa Muslim tersebut untuk ikut keyakinan selain agama Islam.

Kepala sekolah yang menentukan suatu kebijakan melalui sistem demokratis merupakan salah satu contoh teladan bagi peserta didik bahwa sistem moderasi telah diterapkan oleh kepala sekolah. Begitu pula dengan guru yang tidak mudah mencekam kesalahan aturan agama, melainkan dengan pemberian pendekatan yang halus juga menggambarkan moderasi beragama bagi peserta didik. Pada tingkatan pendidikan yang ada, penanaman moderasi beragama paling dianggap efektif jika ditanamkan dan diajarkan pada peserta didik tingkat sekolah dasar, karena peserta didik baru mengenal suatu pembelajaran ketika di bangku sekolah dasar, sehingga kecepatan menerima materi lebih cepat tanpa ada pengetahuan yang lainnya. Tugas dari peserta didik nantinya hanya pada menyesuaikan dengan kehidupan yang terjadi di lingkungan sekolah dan lingkungan rumahnya. Berbeda dengan tingkatan selanjutnya, peserta didik akan

menerima pengetahuan yang lebih luas sehingga kecepatan menangkap materi moderasi beragama akan sedikit terhambat.¹³

Penerapan moderasi beragama di tatanan sekolah bkan berbentuk fatwa atau dalil melainkan dalam bentuk pengajaran sikap atau perilaku yang baik dan tidak baik berkenaan dengan moderasi beragama. Misalnya, dalam bentuk kegiatan keagamaan. Jika di sekolah tersebut terdapat peserta didik yang berbeda agama sedang melangsungkan acara keagamaan, maka peserta didik yang lain dianjurkan untuk ikut serta sebagai bentuk moderasi beragama di sekolah. Anjuran tersebut merupakan pengajaran bagi guru atau kepala sekolah terhadap peserta didik, namun perilaku ikut serta dalam kegiatan keagamaan merupakan bentuk sikap moderasi yang dilakukan secara bersama-sama untuk menciptakan suasana sekolah yang penuh dengan kedaiaman.

Dengan adanya sistem yang seperti itu, lambat laun kebiasaan anak akan berubah dengan sendirinya, yang biasanya memiliki sifat risih terhadap perbedaan disekitar, tapi akan memiliki sifat kebersamaan yang kuat walaupun terdapat perbedaan. Sikap peserta didik akan dibawa kedalam tatanan kehidupan masyarakat, sehingga peserta didik bersikap sewajarnya saja dalam urusan agama. Cukup melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang tanpa harus memperdebatkan perbedaan hukum dan agama dengan orang lain yang dapat menimbulkan kerusakan dan pertengkaran. Kebiasaan-kebiasaan

¹³ M. Kholis Amrullah dan M. Irfan Islamy, *Moderasi Beragama: Penanaman Pada Lembaga Pendidikan Formal Dan Nonformal*, 60.

yang ditanamkan di sekolah itu dapat dibentuk dalam beberapa cara mulai dari pengajaran, kegiatan sekolah, peraturan dan lainnya sesuai dengan beberapa kebijakan yang telah ditetapkan di sekolah mengenai moderasi beragama.¹⁴

3. Menggunakan Waktu Mata Pelajaran Agama Islam Sebagai Praktek Sikap Toleransi Didalam Kelas.

Strategi yang terakhir yang digunakan kepala sekolah dalam menerapkan kebijakan moderasi beragama di sekolah yang dipimpin yaitu dengan menjadikan guru agama Islam sebagai media untuk menanamkan karakter moderat secara khusus pada setiap individu siswa. Kepala sekolah memilih guru agama Islam karena contoh sikap moderat yang akan dipraktekkan akan lebih efektif. Untuk para guru yang lain memang juga dianjurkan untuk memantau bahkan untuk tidak segan-segan menasehati jika didapati siswa yang masih suka mengejek teman yang berbeda agama. Hanya saja secara khusus lebih ditekankan kepada guru agama Islam karena kalau guru mata pelajaran lainnya itu sudah umum jika diikuti oleh siswa non Muslim karena siswa tersebut juga belajar hal sama dengan siswa lainnya. Berbeda dengan ketika mata pelajaran pendidikan agama Islam, karena siswa non Muslim tidak belajar Islam, maka hal itu akan menjadi contoh sikap toleransi yang sangat tepat.

Misalnya, untuk mata pelajaran matematika, IPA, dan lainnya siswa non Muslim akan belajar demikian juga karena itu pelajaran umum,

¹⁴ M. Kholis Amrullah dan M. Irfan Islamy, Moderasi Beragama: Penanaman Pada Lembaga Pendidikan Formal Dan Nonformal, 61.

hanya saja ketika mata pelajaran agama Islam, siswa non Muslim tidak akan mempelajarinya karena itu bukan mata pelajaran wajib baginya. Sehingga ketika ada guru agama Islam yang menganjurkan untuk tetap didalam kelas bersama teman-temannya agar mengikuti mata pelajaran agama Islam walaupun tidak memahami atau tidak mendengarkan, sikap tersebut akan menjadi contoh yang baik bagi siswa untuk bersikap moderat juga. Sehingga tidak ada perbedaan keyakinan dalam kegiatan apapun yang dilaksanakan di sekolah tersebut. Hasilnya, akan lebih maksimal dibandingkan dengan membedakan siswa non Muslim ketika mata pelajaran agama Islam. Hal itu dikarenakan jika siswa non Muslim dianjurkan untuk tidak didalam kelas, maka kebiasaan membeda-bedakan itu akan terbiasa dibawa ke lingkungan masyarakat bahkan terkesan tidak adil bagi guru yang menyarankan siswa tersebut untuk keluar kelas.

Secara praktek, tugas kepala sekolah atas segala kebijakan di sekolah yakni sebagai pemimpin, manajer, supervisi, guru, motivator bagi seluruh bawahannya agar melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Puncaknya ialah pada guru dan murid atau peserta didik yang melaksanakan seluruh pembelajaran serta seluruh kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah. Jika kinerja guru profesional dan sangat baik, maka kualitas peserta didik akan baik pula. Sehingga sebagai kepala sekolah yang mengawasi dan mendorong para guru untuk lebih baik terus terlaksana secara inten.

Kemampuan seorang guru harus dimaksimalkan untuk peserta didik mulai dari kemampuan mengajar, menguasai materi dan komponen

lainnya dalam proses pembelajaran hendaknya dikuasai penuh oleh seorang guru. Meskipun demikian, guru memiliki ketergantungan terhadap kebijakan sekolah. Sedangkan kebijakan sekolah akan memengaruhi iklim sekolah yang menjadikan guru tidak semangat. Kemudian kebijakan tersebut terhubung dengan keputusan seorang pemimpin sekolah. Tanpa adanya seorang pemimpin, kebijakan tidak akan berfungsi dengan manajemen yang telah ditentukan. Sehingga tugas kepala sekolah sebagai pengendali suatu kebijakan hendaknya dapat menciptakan kebijakan yang dapat mendukung iklim sekolah yang nantinya akan terhubung pada semangat kinerja para guru.¹⁵

C. Hasil Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Menerapkan Kebijakan Moderasi Beragama Di SMPN Satu Atap Bujur Barat Pamekasan

Temuan penelitian kebijakan kepala sekolah yang dibuat dalam menerapkan moderasi beragama di SMPN Satu Atap Bujur Barat Pamekasan membuahkan beberapa hasil yang signifikan bagi seluruh warga sekolah. Dampaknya tidak hanya pada lembaga, melainkan juga setiap individu bahkan ke lingkungan sekitar sekolah. Hal itu tentunya tidak lepas dari segala usaha tim sekolah yang secara terus menerus serta sabar menggembleng peserta didiknya untuk bersikap moderat pada siapa saja termasuk pada yang beda agama. Selain kondisi sekolah yang kini harmonis tanpa adanya deskriminasi, siswa non Muslim yang awalnya diejek dan diolok-olok lantaran beda agama kini menjadi teman yang berbaur satu sama lainnya. Bahkan yang awalnya

¹⁵ Muhammad Afdal dan Sulvahrul Amin, Implementasi Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru di SMA Negeri 4 Kabupaten Bantaeng, 117.

masyarakat sekitar sangat fanatik akan seseorang yang berbeda agama, pada saat ini mulai menipis karena kebanyakan dari anak-anaknya sekolah di smpn Satu Atap Bujur Barat yang mana telah berubah sikapnya dalam hal menghadapi orang-orang yang berbeda agama.

Menurut Ekosiswoyo, mengatakan bahwa kepala sekolah merupakan seseorang dengan identitas kepemimpinan, dan kepemimpinan ialah kemampuan seseorang dalam memberikan pengaruh positif terhadap orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian jika pendapat tersebut dikaitkan dengan tugas kepala sekolah sebagai pemimpin, maka kepala sekolah bertanggung jawab dalam kebijakan sekolah termasuk didalamnya dapat menggerakkan, memotivasi, dan memberikan kontrol terhadap kinerja guru dan bawahannya agar melaksanakan tugas dengan optimal, efektif, dan efisien. Kepala sekolah memiliki peran penting dalam penentuan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. hal tersebut dikarenakan makna secara hakikat dari kepala sekolah merupakan seorang guru yang memiliki tugas tambahan sebagai pemimpin sekolah.

Sehubungan dengan tugas tambahan sebagai pemimpin, bukan lagi hanya sebagai guru yang fokus dalam proses pembelajaran, maka kepala sekolah bertugas dalam melakukan supervisi atas segala kebijakan sekolah. Dari hal tersebut, supervisi yang sesungguhnya dalam dunia pendidikan ialah kepala sekolah karena kepala sekolah lebih mengetahui atas segala kebijakan dan atas terlaksananya kebijakan sesuai keinginan atau tidak. Namun pada masa sekarang untuk supervisi sekolah itu terdapat tugas kepada yang lebih

khusus mengawasi suatu sekolah. Sehingga terkadang supervisi dari luar kurang mendalami apa yang terjadi di sekolah meskipun nantinya terdapat solusi pembinaan. Namun, tujuan adanya supervisi khusus tersebut tidak lain hanya untuk melakukan kontrol agar bisa mengawasi dan mengendalikan jalannya pendidikan menuju tujuan yang ingin dicapai. Kepala sekolah yang juga berperan sebagai supervisi, harus menjadi jembatan komunikasi antara tenaga kependidikan dengan bawahannya untuk memberikan pengawasan pribadi, menunjuk serta mendelegasikan suatu tugas kepada masing-masing bawahannya. Sehingga kepala sekolah harus menguasai keahlian pribadi, dasar, pengalaman, pengetahuan, serta pengawasan. Dengan demikian kepala sekolah akan mampu mengatasi setiap permasalahan yang datang baik yang bersal dari sumber daya manusia ataupun berasal dari fasilitas sekolah.¹⁶

Kini sekolah tersebut menjadi sekolah yang bersuasana moderasi. Seperti halnya sekolah negeri umum lainnya, kini siswa non Muslim yang sekolah ditempat tersebut walaupun jaraknya jauh dari perkotaan, tetapi juga dikatakan sebagai sekolah yang terbuka akan setiap peserta didik walaupun beda agama. Mayoritas di sekolah tersebut memang agama Islam, tetapi sehubungan sekolah sangat terbuka akan siapa saja yang ingin belajar disana, kini sekolah tersebut juga terdapat siswa yang non Muslim bahkan juga terdapat yang sudah lulus. Suasana moderasi yang diciptakan oleh sekolah juga berdampak ke lingkungan masyarakat. Harapan kepala sekolah untuk masa yang akan datang, kebijakan yang dibuatnya dapat dijadikan pedoman

¹⁶ Zaenab Hanim dkk, Kebijakan Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Guru, 47-48.

masyarakat bahwa agama itu adalah hak setiap individu yang tidak dipaksakan untuk sama dengan yang menjadi mayoritas.

Moderasi beragama yang terdapat dalam pemikiran Islam yakni mengutamakan sikap toleransi dalam setiap perbedaan. Toleransi berarti terbuka akan setiap perbedaan yang ada. paling penting dalam pemikiran Islam ialah asas kemanusiaan baik dalam menjalin hubungan kerja, sosial, ekonomi dan lainnya tanpa mementingkan perbedaan yang ada. Meyakini apa yang diyakini dengan benar itu tidak harus dengan melecehkan keyakinan yang lain yang akhirnya akan tercipta suasana kehidupan yang damai dan tenteram dengan mengedepankan rasa persaudaraan dan satu kesatuan.¹⁷

Adapun hasil yang didapat oleh SMPN Satu Atap Bujur Barat Pamekasan atas kebijakan kepala sekolah dalam menerapkan moderasi beragama akan dirinci sebagai berikut:

1. Merubah Sifat Dan Sikap Fanatisme Terhadap Suatu Agama

Hasil yang sangat signifikan dapat dilihat akan kebijakan kepala sekolah agar bermoderasi agama pertama ialah merubah sikap fanatik terhadap perbedaan agama. Salah satu alasan kepala sekolah membuat kebijakan tersebut, karena sering adanya laporan bahwa siswa yang sekolah di tempat tersebut sering diganggu oleh teman-temannya karena berbeda agama dengan yang lain. Gangguan tersebut tentunya akibat dari latar belakang siswa yang mayoritas berasal dari desa yang mana masyarakat di desa tersebut banyak yang bersikap fanatik pada agama

¹⁷ Edy Sutrisno, Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan, 332.

Islam. Sehingga ketika ada orang yang berbeda agama akan dianggap sebagai orang yang salah. Dengan adanya kebijakan tersebut, akhirnya sifat fanatik yang telah melekat pada siswa, hilang karena telah terbiasa diberi pemahaman dan kebiasaan perilaku di sekolah untuk bersikap toleransi pada setiap perbedaan.

Sikap toleransi yang sudah melekat dalam keperibadian siswa di sekolah tersebut menjadikan suasana sekolah yang awalnya fanatik dengan perbedaan, kini menjadi suasana yang harmonis dan rukun. Tidak ada lagi yang diolok dan diejek, tidak ada lagi yang disudutkan, tidak ada lagi yang tidak punya teman. Semuanya berbaaur satu sama lain dengan tujuan yang sama yaitu untuk menempuh pendidikan. Bahkan kini siswa non Muslim berteman dengan lainnya serta beraktifitas dalam kegiatan apapun selayaknya siswa yang lain tanpa ada beban latar belakang agamanya. Hal itu dikarenakan teman dan warga sekolah menerima siswa tersebut dengan sikap yang sama dan adil tanpa dibeda-bedakan satu sama lain. Untuk hidup berdampingan dalam satu kesatuan memang kuncinya ialah menghiangkan sikap fanatik antar individu. Hal itu dikarenakan dapat menyebabkan suatu pertengkaran, kerusuhan, kekerasan dan lainnya yang menyebabkan kehidupan sosial masyarakat menjadi tidak rukun dan harmonis.

Dalam hukum Islampun, sikap moderasi harus diutamakan karena antara teks dan realitas yang ada sama-sama berjalan dalam menentukan suatu hukum. Hal itu dikarenakan yang tercantum dalam Al-Quran dan

Hadits tidak pernah bertolak belakang dengan urusan manusia yang maslahat. Suatu hukum yang baru berdasarkan pada hasil ijtihad para ulama, meskipun harus memperhatikan yang mutlak dalam Al-Quran dan Hadits juga harus memperhatikan fleksibilitas pada kenyataan kehidupan yang berbeda dari zaman ke zaman. Tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan sosial kehidupan masyarakat berubah secara dinamis yang membutuhkan hukum baru yang lahir dari ijtihad ulama namun tetap berada dalam konteks kesesuaian dengan Al-Quran dan Hadits. Tidak bisa hanya terpaku pada sumber hukum Islam, karena turunnya hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadits berbeda zaman dengan sekarang.¹⁸

2. Merubah Sikap Dan Karakter Siswa Yang Deskriminasi Menjadi Netral

Sebelum adanya kebijakan moderasi beragama dari kepala sekolah, siswa non Muslim yang sekolah di SMPN Satu Atap Bujur Barat Pamekasan hanya memiliki teman sedikit. Hal itu dikarenakan siswa yang beragama non Muslim dianggap sebagai aib di sekolah tersebut. Tentunya hal itu dipengaruhi oleh faktor geografis para siswa di sekolah itu yang tempat tinggalnya berada di pedesaan yang identik dengan sikap fanatik. Selain hanya memiliki teman yang sedikit, sering kali siswa non Muslim dipojokkan oleh siswa Muslim lainnya. Namun akhirnya, perlakuan deskriminasi tersebut akhirnya hilang lambat laun ketika ada kebijakan dari kepala sekolah untuk bersikap moderat.

¹⁸ Edy Sutrisno, Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan, 331.

Kini seluruh warga sekolah SMPN tersebut memiliki sifat netral terhadap segala perbedaan termasuk yang beda agama. Jadi, dalam berteman dan belajar, tidak ada lagi yang disudutkan melainkan diperlakukan sama semua bahkan siswa non Muslim yang awalnya hanya memiliki teman sedikit, kini memiliki teman yang banyak seperti halnya siswa yang lain. Perlakuan yang membeda-bedakan antara siswa non Muslim dengan siswa Muslim lainnya kini tidak ada lagi bahkan dalam pelajaran apapun termasuk mata pelajaran agama Islam, siswa non Muslim tidak dibedakan. Semuanya berbaur seperti halnya tidak beda agama.

Dalam akidah Islam, sikap moderasi ini dikenalkan oleh salah satu aliran Islam yaitu aliran asy'ariyah yang mana bersikap menengahi terhadap aliran muktazilah yang identik dan kental dengan pola pikir rasionalnya dengan aliran salafiah dan hanabilah yang identik dengan pola pikir yang tekstual. Keduanya sama-sama ekstrem dalam menyikapi dan mempertahankan pendapatnya. Aliran muktazilah begitu ekstrem menganggap bahwa akal berada pada posisi diatas dari segala-galanya dengan cara mengambil suatu kesimpulan melalui beberapa premis yang sifatnya logistik. Sedangkan aliran salafiah dan hanabilah menganggap bahwa teks merupakan segala-galanya dalam mengatasi suatu persoalan hingga mengabaikan hal yang masuk akal. Sehingga sikap kedua aliran ini dianggap sebagai sikap yang jauh dari cerminan Islam bahwa Islam merupakan agama yang seimbang. Oleh sebab itu, aliran asy'ariyah berada

ditengah-tengah antara kedua aliran tersebut bahwa akal dan teks sama-sama dibutuhkan dalam suatu persoalan.¹⁹

¹⁹ Edy Sutrisno, Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan, 331.